

Peranan hamas dalam konflik palestina – israel tahun 1967 – 1972

Oleh:

Ida Fitrianingrum

K4400026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di abad XX ini banyak sekali sengketa antar negara yang menjadi topik perhatian seluruh dunia. Antara lain konflik Arab melawan Israel dalam memperebutkan tanah Palestina. Konflik ini disebabkan perlawanan dan penolakan dari rakyat Arab Palestina yang didukung negara-negara Arab atas berdirinya negara Republik Israel di tanah Palestina. Disatu pihak Israel dibantu Inggris dan Perancis dengan mudah dapat menaklukkan negara-negara Arab, dan dipihak lain rakyat Palestina menjadi kehilangan tempat berpijak dan tersebar menjadi pengungsi di beberapa negara (Majid Kailani, 1988:209).

Israel adalah sebuah negara kecil di pinggiran Timur Laut Tengah. Di seputar negara yang mengaku sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi, ada sejumlah negara Arab. Di sebelah Utara ada Lebanon, di Timur ada Yordania dan Suriah, di Barat Daya ada Mesir. (M.Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, 1993:48).

Melihat letak geografisnya Israel berbeda dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Israel adalah negara Yahudi yang dikelilingi oleh negara yang mayoritas muslim. Orang Israel kebudayaannya bergaya Barat, namun hidup di tengah masyarakat dengan kebudayaan Timur. Bangsa Yahudi adalah masyarakat imigran atau keturunan imigran. Sementara tetangganya adalah penghuni turun temurun yang mendiami desa atau kampung selama ribuan tahun (M. Riza Sihbudi.1995:56).

Tanah Palestina sebelumnya telah didiami oleh bangsa Arab sejak ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi bangsa Yahudi mengklaim bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, dan inilah yang dijadikan pegangan oleh kaum Zionis dalam upaya mendirikan negara Israel bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia.

Masalah Palestina ini telah ada sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir, yakni beberapa saat sebelum Perang Dunia I berakhir. Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini makin meruncing, setelah Israel bersikeras untuk mendirikan suatu negara merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Sejak proklamasi kemerdekaan Israel sehingga sekarang konflik antara negara Yahudi itu dengan negara-negara Arab di sekitarnya merupakan problem politik yang paling krusial. Penyebab utama konflik di Timur Tengah tersebut tidak lain adalah politik Dunia Barat yang memecah belah dan membagi-bagi Dunia Arab ke dalam daerah pengaruh mereka masing-masing, seperti negara Palestina yang diserahkan Inggris kepada Yahudi. Ini membuktikan Dunia Barat ingin menguasai kawasan yang dianggap mempunyai nilai strategi bagi kepentingan negara tersebut

Keberadaan Israel sendiri di tengah negara-negara Arab, telah menjadi *dispute* berkepanjangan yang hingga hari ini belum ada kesepakatan yang pasti. Secara historis, emperium-emperium yang pernah berkuasa di kawasan Timur Tengah, baik Mesir, Persia, maupun Romawi dan bahkan emperium Ottoman Turki, belum pernah berhasil menyepakati tapal batas yang jelas bagi keberadaan wilayah Israel. Konflik yang semula berakar dari kepentingan Israel untuk memiliki *nasional territory* bagi bangunan *nasional home*-nya itu, kini telah berkembang demikian rumit dan runyam dengan semakin kuatnya posisi Israel dan terus terjepitnya posisi Arab untuk menggolkan usulan-usulan perdamaianya serta masuknya konsep perdamaian hasil rekayasa pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik ini telah berkembang menjadi konflik multi-dimensional.

Awal berdirinya negara Israel tidak terlepas dari usaha Zionisme yang melatar belaknginya. Biasanya istilah Zionisme lekat hubungannya dengan nama Theodor Herzl (1860-1904). Herzl lah penyusun doktrin Zionisme sejak 1882 di Wina. Konggres pertama Zionis yang berlangsung di Basle, Swiss Agustus 1897, dalam suasana yang penuh antusias berhasil merumuskan tujuan gerakan Zionis, “Zionis bertujuan mendirikan perumahan bagi bangsa Yahudi di Palestina yang dijamin dengan undang-undang “. Konggres juga membuat sarana yang akan melaksanakan tugas rencana itu, yaitu Organisasi Yahudi sedunia. Herzl dalam catatan hariannya menuliskan kata-kata ramalan “di Basle saya mendirikan negaraYahudi”. (Yacob katz & Friends, 1972 :47).

Jauh sebelum kejadian itu istilah Zionisme pernah dipakai untuk menyebut sekelompok orang penganut Yudaisme. Kelompok itu adalah penganut Yudaisme yang menginginkan datangnya juru selamat kelak di akhir zaman, maka pada masa itu “semua keluarga dunia ini “ akan dipanggil ke kerajaan Tuhan. Kerajaan ini akan dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. (R. Garaudy, 1988:112).

Menurut R. Sihbudi (1996:67) bahwa Zionisme keagamaan hanya menginginkan tersebarnya agama Yahudi dan kebudayaannya di seluruh dunia tidak menghendaki negara sendiri.

Untuk merealisasikan berdirinya negara Yahudi di Palestina, kaum Zionis berusaha mendekati Sultan Turki Hamid I (Khalifah Ottoman) yang pada masa itu menguasai atas tanah Palestina. Herzl pada waktu itu menjanjikan akan memberikan bantuan ekonomi kepada Turki, asalkan orang-orang Yahudi diberikan izin untuk berjarah secara bebas ke bumi Palestina (R. Garaudy, 1985:113). Ternyata Sultan tidak mudah dibujuk oleh kelicikan Herzl, bagi Sultan tanah Palestina bukanlah milik tangan kanannya akan tetapi milik orang muslim oleh karena itu tidak sedikitpun ingin melepaskan tanah itu.

Walaupun usaha kaum Zionis untuk merayu Sultan Hamid I telah mengalami kegagalan, namun Herzl tidak mudah menyerah dan terus mencari cara agar bias “membeli “ Palestina. Sultan mulai sadar akan bahaya besar itu, dengan serta merta dibuatnya undang-undang “Paspor Merah” yang khususnya bagi orang-orang Yahudi yang berkunjung ke Palestina. Juga di undang larangan orang Yahudi memiliki tanah atau bermukim di Palestina. Sultan mengutus Menteri Dalam Negerinya Mamduh Pasya untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada Gubernur Palestina, Rauf Pasya, supaya lebih ketat lagi menanggulangi orang-orang Yahudi yang hendak tinggal di Palestina dan terutama di kota Yerusalem, kecuali hanya untuk berjarah dalam batas waktu tertentu (Jalal, Alam, Syeikh Ali Thantawi, Syeikh Muhammad Namer Al-Khatib, 1990:77).

Setelah usaha kaum Zionis mendekati Sultan Hamid I mengalami kegagalan, Herzl mulai melakukan strategi lain yaitu dengan mendekati Pemerintah Inggris yang pada saat itu menguasai Mesir. Wilayah yang coba diminta itu adalah daerah EI Arish (Sinai) yang terletak di perbatasan dengan bagian selatan wilayah Palestina. Oleh karena

kondisi alam yang sangat kurang menguntungkan, yaitu kurang cocok untuk pertanian dan kurangnya sumber air, sehingga hanya akan menyerap jumlah imigran Yahudi yang terbatas maka dibatalkan. Penguasa Inggris juga menawarkan daerah seluas 15.440 km persegi di Uganda sebagai pemukiman yahudi. Namun hal itu ditolak oleh kaum Zionis, karena yang diincar adalah tanah Palestina sebagai Home Land (Tanah Air) bangsa yahudi. (Riza Sihbudi, 1991:74-75).

Pada tahun 1908 di negari-negeri Arab timbul gerakan kebangsaan untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Di dalam Konferensi Nasionalis Arab yang pertama di Paris pada tahun 1913, antara lain diputuskan memajukan keinginan-keinginan bangsa Arab ini kepada pemerintah Turki. Akan tetapi tuntutan nasional ini ditentang oleh kaum reaksioner Turki yang tergabung dalam partai Al-Itihad Wattaraqi yang pada waktu itu memegang kendali pemerintahan (Daliman, 1994:44).

Pada masa Perang Dunia I (PD I) Turki memihak Jerman berperang melawan tentara Sekutu. Alasan Turki bergabung dengan Jerman disebabkan oleh semakin agresifnya sikap Inggris yang ingin menguasai daerah-daerah kekuasaan Turki di Dunia Arab, sebelumnya sering terjadi persengketaan antara Pemerintah Turki dengan Pemerintah Inggris di wilayah perbatasan kekuasaan kedua negara di Dunia Arab.

Pemerintah Inggris yang pada masa itu memiliki kepentingan politik dan ekonomi di daerah jajahannya sangat khawatir dengan kemajuan militer Turki di medan pertempuran sebelah Timur. Maka Inggris merayu bangsa-bangsa Arab agar mau bertempur bersama sekutu melawan koalisi Turki dan Jerman. Untuk mendapatkan bantuan kekuatan dari bangsa Arab, maka Pemerintah Inggris menawarkan kepada bangsa-bangsa Arab agar menyokong sekutu dan setelah selesai perang akan diberi kemerdekaan penuh bagi setiap negara Arab itu termasuk Palestina.

Berdasarkan perjanjian antara negara-negara Arab dengan Inggris maka negara-negara Arab ikut memerangi Turki. Untuk tujuan ini timbullah korespondensi antara Syarif Husein dengan Sir Henry Mc Mahon. Korespondensi ini terkenal dengan nama "Husein-Mc Mahon Correspondence". (Fuad Mohammad Fachruddin, 1992:67-68).

Di dalam korespondensi itu tidak disebut-sebut Palestina atau kedudukan Yahudi ataupun Zionis, tuntutan satu-satunya bagi bangsa Arab tidak lebih dan tidak kurang dari pada kemerdekaan penuh bagi bangsa Arab atas seluruh tanah Arab.

Walaupun peperangan sudah berlangsung dua setengah tahun, namun tentara Turki dan Jerman belum dapat dikalahkan oleh Sekutu. Usaha Inggris untuk memenangkan perang adalah dengan melibatkan Amerika Serikat dalam pertempuran melawan koalisi Jerman, akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan.

Cara lain yang ditempuh oleh Pemerintah Inggris adalah dengan mempengaruhi opini public di sana sangat dipengaruhi oleh anasir Yahudi dan Inggris mengetahui bahwa bangsa Yahudi mempunyai cita-cita di tanah Palestina, yaitu ingin menjadikan tanah Palestina sebagai tanah airnya.

Inilah awal malapetaka yang berkepanjangan dikemudian hari bagi eksistensi bangsa Arab Palestina. Menurut Fuad Mochammads Fahrudin (1992:71) bahwa disaat bangsa Arab mempunyai keyakinan, bahwa bangsa Arab berjuang untuk kemerdekaan, namun Inggris secara rahasia berunding untuk mengadakan Perjanjian Balfour tahun 1917 dan perjanjian dengan Perancis tahun 1916.

Dampak Deklarasi Balfour dalam opini dikalangan bangsa Yahudi sangat luar biasa besarnya. (Yacob Katz & Friends, 1996:49). Bagi kaum Zionis Deklarasi Balfour 1917 merupakan titik awal dari pengesahan masuknya imigran Yahudi ke tanah Palestina. Setelah dikeluarkannya Deklarasi Balfour ini imigran Yahudi dari luar palestina khususnya negara Eropa Timur mulai dilaksanakan, sehingga jumlah orang-orang Yahudi di Palestina semakin besar.

Hasil dari perjanjian antara Inggris dengan Perancis (Sykes-Pycot Agreement) memutuskan untuk membagi-bagi negara-negara Arab. Setelah berakhirnya PD I, Turki yang memihak Jerman mengalami kekalahan dan terusir dari Timur Tengah, maka pemerintah Inggris dan Perancis menguasai daerah-daerah kekuasaan Turki di Timur Tengah.

Pada tanggal 25 April 1925 panglima-panglima tentara Sekutu mengadakan konferensi di San Remo, Italia. Dewan Sekutu memberikan mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Pada tanggal 27 Juli 1925 LBB mengesahkan Inggris sebagai pemegang mandat itu secara formal. Mandat itu juga menyatakan agar pemegang mandat menyediakan bagi bangsa Yahudi tempat tinggal Nasional di tanah Palestina. Pasal 6 dari mandat itu memberikan kemudahan bagi imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina. (Ishlah, 1995:10).

Sementara itu arus imigrasi Yahudi ke Palestina semakin besar jumlahnya, sehingga jumlahnya semakin bertambah dengan cepat. Jumlah itu mencapai puncaknya pada tahun 1925, ketika 33.801 orang Yahudi masuk ke Palestina, mereka kebanyakan berasal dari Eropa Timur. Kedatangan mereka ke Palestina tidak dengan badan kosong, melainkan dengan membawa modal dan keahlian yang besar, sehingga mampu menjalankan roda perekonomian di Palestina. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bangsa Arab.

Bangsa Arab melihat kondisi yang demikian semakin curiga dengan sikap pemerintah Inggris, yang memberikan kemudahan bagi masuknya imigran Yahudi ke Palestina. Bangsa Arab semakin yakin dengan rencana-rencana kaum Zionis yang ingin mendirikan negara nasional di Palestina. Sementara itu tuntutan bangsa Arab mengenai kemerdekaan semakin menggebu. Dengan demikian timbul semangat perlawanan dari bangsa Arab terhadap Pemerintah Inggris.

Pada tahun 1930-an timbul pemberontakan di Palestina terhadap Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Izzuddin Al-Qasam (1882-1935). Pemberontakan rakyat Palestina tahun 1931-an merupakan konflik terbuka yang pertama sekaligus yang terbesar dalam konflik Palestina. Kerusuhan ini menimbulkan suasana yang tidak terkendali. Sehingga Pemerintah Inggris harus mengambil langkah serius dengan mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Aksi militer Inggris menyebabkan jatuhnya banyak korban di kalangan rakyat Palestina. Pemberontakan dapat dipadamkan setelah ribuan rakyat Palestina tewas dalam pertempuran tersebut. (Ahmad Fauzi, 1996:37)..

Dalam rangka memaksa Pemerintah Inggris menghentikan imigran Yahudi masuk ke Palestina dan menempatkan Palestina di bawah kekuasaan Negara Arab pada tahun 1936 timbul pemogokan nasional. Pemogokan ini kemudian berubah menjadi pertikaian antara rakyat Palestina dan Pemerintah Inggris yang dibantu kaum Zionis Yahudi. Komisi Tinggi Arab Dibentuk untuk melaksanakan perjuangan itu.

Untuk menghentikan perlawanan rakyat Arab, Pemerintah Inggris membentuk komisi yang bertugas untuk menyelidiki situasi keamanan di Palestina. Komisi ini dipimpin oleh Lord Peel. Sebenarnya rakyat Arab tidak mau menghentikan pemogokan, akan tetapi karena adanya himbauan dari penguasa-penguasa Arab di Irak, Saudi Arabia, Yaman dan Transjordan, pemogokan dapat dihentikan. Akan tetapi kemudian pihak

Arab memboikot komisi Feil karena mengizinkan lagi imigrasi Yahudi. (Yacob Katz & Friends, 1996:51).

Setelah mengkaji berbagai macam rencana usulan untuk menyelesaikan masalah, komisi memilih rencana membagi Palestina menjadi dua bagian. Satu bagian untuk bangsa Arab dan satu bagian untuk bangsa Yahudi dan Zona internasional yang meliputi kota Yerusalem dengan demikian untuk pertama kalinya muncul rencana mendirikan negara Yahudi dari lembaga resmi Pemerintah Inggris.

Rencana itu ternyata tidak memuaskan bangsa Arab sehingga pertikaian berlangsung terus. Kaum Yahudi tidak begitu antusias dengan rencana komisi Feil. Pemerintah Inggris mengambil tindakan yang sangat keras untuk menghentikan huru-hara di Palestina.

Untuk mencapai titik temu antara pihak-pihak yang bertikai di Palestina, pada bulan Desember 1938 Pemerintah Inggris mengundang untuk mengadakan konferensi di London yang dihadiri oleh utusan Arab dan Yahudi. Konferensi ini berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan, tidak ada kesepakatan apapun yang diperoleh dari pertemuan itu. Pihak Arab bersikeras menuntut dibubarkannya kebijaksanaan Perumahan Nasional Yahudi dan dibentuknya pemerintahan sendiri.

Pada waktu itu Pemerintah Inggris sedang menghadapi masalah yang berat yaitu dalam rangka menghadapi Perang Dunia II (PD II) melawan Hitler, sementara itu Inggris pun tidak ingin kehilangan wilayah jajahan yang strategis. Maka pada tahun 1939 dikeluarkannya Buku putih (White Paper) yang berisi antara lain mengenai pembatasan imigrasi Yahudi ke Palestina. Buku putih ini mendapat tanggapan yang keras dari bangsa Arab maupun bangsa Yahudi. Komisi mandat LBB mengkritik keras kebijakan pemerintah Inggris itu, Perserikatan Bangsa-bangsa dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan Inggris itu tidak sesuai dengan pemahaman yang dimaksud oleh komisi mengenai Pemerintah Mandat Inggris. (Yacob & friends, 1996:53).

Walaupun sudah ada pembatasan, namun imigrasi Yahudi ke Palestina terus meningkat. Sehingga jumlah mereka bertambah banyak keadaan ini membuat bangsa Palestina semakin cemas. Tanda akan meluasnya perang semakin jelas, apalagi dengan ancaman Perang Dunia II.

Pada tahun 1940-1945 Perang dunia II berkobar hamper diseluruh benua. Perang Dunia II merupakan awal malapetaka yang hebat bagi bangsa Yahudi di Eropa. Pemerintahan Nazi Hitler di Jerman melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga arus imigran Yahudi ke Palestina semakin bertambah. Jumlah orang Yahudi yang ditangkap Nazi Hitler sekitar 4 juta orang yang ditempatkan diberbagai kamp tawanan. Hingga akhir tahun 1944, menjelang kekalahan Hitler tak kurang dari 3,5 juta orang Yahudi yang dimusnahkan Hitler.

Beberapa bulan menjelang keruntuhan Hitler, diadakan perundingan di Yalta pada bulan Februari 1945 antara Presiden AS, Rossevelt, PM Kerajaan Inggris W Churchil dan PM UNI Soviet Stalin. Pertemuan agar memberikan kemerdekaan kepada bangsa Arab Palestina. (Ibrahim Latief,1991:23). Pada bulan Agustus 1945 Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan negara-negar Fasis.

Setelah Perang Dunia II selesai bangsa Arab Palestinamenuntut agar Inggris segera memberikan kemerdekaan sesuai dengan anjuran dalam perundingan Yalta. Akan tetapi di pihak Inggris tidak tegas dan lebih banyak berpihak kepada kaum Zionis Yahudi dan berusaha mengulur-ulur waktu. Sementara orang-orang Yahudi yang bertebaran di luar negeri secara terus menerus pindah ke Palestina, namun menjelang akhir tahun 1947 ketika PBB merencanakan membagi Palestina, bangsa Arab masih merupakan mayoritas dengan jumlah orang Yahudi mencapai sepertiganya, 608.225 orang Yahudi berbanding 1.237.332 orang Arab. (Faul Findley, 1995:167).

Pertumpahan darah dan pergolakan politik di bumi Palestina semakin mencemaskan. Sedangkan pasukan Inggris yang berada di Palestina tidak bias menguasai keadaan. PBB dengan resolusi nomor 181 tanggal 19 November 1947 memerintahkan supaya Inggris segera menarik pasukannya dari Palestina. Keadaan hari demi hari semakin kacau dan mencekam, hampir seluruh negeri ini orang Arab Palestina dan orang Yahudi saling bertempur. Teror yang dilancarkan oleh kaum Zionis terhadap penduduk sipil Yahudi semakin merajalela, setiap hari ada saja penduduk Palestina yang terbunuh. (Ibrahim Latief, 1991:23).

Pada tanggal 28 April 1947 PBB secara khusus membahas perseolan Palestina, tanggal 15 Mei 1947, PBB membentuk komisi khusus untuk Palestina. Setelah mengadakan penyelidikan dan mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang bertikai di

Palestina pada tanggal 1 September 1947 komisi ini menyerahkan kepada Dewan Keamanan PBB 11 Pasal suci Yerusalem. Sementara itu sejumlah orang Arab Palestina yang mengungsi ke luar negeri sudah melebihi 700.000 orang, jumlah itu setiap harinya terus bertambah. Atas desakan PBB., pasukan Inggris mulai meningkatkan Palestina sejak bulan Maret 1948, kemudian pada tanggal 15 Mei 1948 secara resmi PBB mencabut mandat Inggris atas Palestina. (Ibrahim Latief,1991:23).

Akan tetapi sebelum mandat Inggris dicabut yaitu pada tanggal 14 Mei 1948 lewat tengah malam, jadi berarti sudah masuk tanggal 15 Mei pemancar radio Israel mengumumkan Proklamasi berdirinya negara Israel dan mengumumkan susunan pemerintahannya. Dengan demikian jelaslah bahwa nasib bangsa Palestina seperti terabaikan, karena PBB sama sekali tidak menghalangi berdirinya negara Yahudi. Sedangkan resolusi PBB no 181 menetapkan bahwa di Palestina akan berdiri dua negara yaitu Palestina dan Israel. Sebelum Proklamasi sepihak itu tentara –tentara Yahudi melakukan sapu bersih pemukiman Arab. Selama tahun 1948 lebih dari 70 % warga Arab Palestina terusir dari rumah dan kampung halamannya yang dikuasai kaum Zionis Yahudi.

Telah terjadi tiga kali perang besar antara negara-negara Arab dengan Israel, yaitu pada tahun 1948, 1967 dan 1973. Dalam setiap peperangan dengan bangsa Arab Israel selalu dibantu oleh Amerika dan berbagai negara Eropa (Barat) lainnya. Disamping itu telah terjadi perang ketika Mesir menasionalisasikan Terusan Zues pada tahun 1956, maka Inggris, Perancis dan Israel menyerbu Mesir. Pada tahun 1982 Israel menyerbu Lebanon, dalam usaha menghancurkan basis PLO dan akhirnya Israel memasuki Lebanon Selatan.

Setiap perang antara negara-negara Arab dan Israel, negara Arab selalu menderita kekalahan. Dalam perang tahun 1967 seluruh tanah Palestina yaitu West Bank, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza jatuh ke tangan Israel, bahkan Sinai (daerah Mesir) dan dataran tinggi Golan (milik Syiria)jatuh pula ke tangan Israel (Lukman Harun, 1992:51).

Warga Palestina di daerah pendudukan mengakui PLO sebagai wakil yang sah dari rakyat Palestina, namun setelah sekian lama tidak terjadi perubahan di daerah pendudukan menyebabkan mereka kecewa dan frustrasi, karena perhatian PLO lebih

tercurah pada rakyat Palestina yang berada di pengasingan daripada yang berada di daerah pendudukan. Selain itu dana bantuan PLO yang diperlan oleh rakyat Palestina di daerah pendudukantidak mengalir, padahal dana itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga Palestina di daerah pendudukan. Akibatnya perbaikan perekonomian dan kehidupan sosial warga Palestina menjadi terhambat dan tidak makin membaik (Kirdi Dipoyudo,1982:124). Perasaan tersebut terutama muncul dari kalangan pemuda dan remaja Palestina. Kelompok ini kemudian menjadi ujung tombak dari munculnya gerakan *Intifadah* di jalur Gaza dan Tepi Barat.

Gerakan *Intifadah* merupakan wadah bagi kaum muda dan remaja Palestina dalam melakukan perlawanan terhadap Zionisme Israel. Penggerak utama *Intifadah* adalah HAMAS (*Harakat Muqawwamat Al-Islamiyyat*). Dalam gerakannya kaum muda HAMAS tidak segan-segan membunuh puluhan warga Israel sebagai aksi balas dendam terhadap perlakuan penguasa Israel yang menahan atau menembak mati warga palestina dan anggota HAMAS. Para pemuda yang tergabung di dalam kelompok HAMAS tersebut telah dididik menjadi seseorang yang mempunyai mental tangguh dan keras. Mereka pun berani mati demi apa yang saat ini sedang mereka perjuangkan yaitu kebebasan dan kemerdekaan bangsa Palestina (Daliman, 2000:50-52)

Meskipun relatif muda, Gerakan Perlawanan Islam, Hamas telah menjadi kekuatan signifikan dalam atmosfer politik Palestina. Sejumlah faktor menjadikan Hamas populer di kalangan rakyat, yakni seruanya untuk membebaskan semua Palestina. Hamas juga terkenal karena reputasi kejujuran, efesiensi dan nir korupsi. Serangan gagah berani dan sukses atas target-target militer Israel, daya pegas mengagumkan yang menggoncangkan Israel, hadirnya para pemimpinnya di wilayah pendudukan, berbeda dengan para pemimpin PLO diperantauan serta sikap kokohnya berbalikan dengan PLO yang meninggalkan perlawanan bersenjata melawan negara Zionis.

Kemampuan gerakan ini tidak hanya dari survivalitasnya, namun hadir sebagai pesaing utama bagi perwakilan Palestina. Pendekatan populisme Hamas dan bersikap hati-hati dalam hubungan inter- Arab berimplikasi pada dukungan atas setiap operasinya. Perjanjian damai yang disepakati bulan September tidak serta merta menghalangi Hamas berkonfrontasi dengan Israel. Para Islamis berpandangan bahwa perjanjian itu sebagai dokumen palsu yang bertujuan melegetimasi kontrol Israel atas tanah dan sumber daya

Palestina. Mereka menghawatirkan kemungkinan kekerasan berdarah antar faksi sehingga berulang kali menyebarkan pamflet yang melarang anggotanya terlibat dalam tindakan semacam itu. Kebijakan pragmatis itu mampu menjamin survivalitas Hamas sehingga menjadi elemen penting masa depan di daerah pendudukan.

Tujuan HAMAS seperti yang digariskan oleh Ahmad Yasin (tokoh HAMAS) adalah mendirikan negara Palestina berdasarkan syariat Islam meskipun mengakui bahwa Palestina merupakan tanah suci kaum Muslimin, Yahudi dan Nasrani. Menurut Ahmad Yasin, Palestina patut didirikan sebagai sebuah negara Islam karena mayoritas penduduk menganut Islam. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani akan diperlakukan sesuai dengan ajaran Qur'an. Sedangkan PLO pimpinan Yasser Arafat mengupayakan pendirian negara Palestina independen yang tidak berdasarkan agama tertentu (Tempo, 16 Januari 1993).

Masalah Palestina telah melebar menjadi konflik Arab-Israel melibatkan berbagai pihak antara lain: Israel, rakyat Arab Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), negara-negara Arab, dan negara-negara besar (Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-negara Eropa lainnya).

Masalah Palestina semakin ruwet karena campur tangan pihak luar yang sebetulnya hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Kecuali itu juga adanya perbedaan-perbedaan pendapat antara Israel dengan Arab Palestina maupun negara-negara Arab, tentang dasar klaim mereka atas tanah Palestina. Alasan keduanya sangat bertolak belakang, dan tidak mempunyai LBB maupun PBB dalam menangani dan cenderung bersikap berat sebelah, sehingga menimbulkan rasa tidak puas dan memanasnya emosi Arab kemudian berusaha menggempur negara Israel (Kirdi Dipoyudo, 1982: 97-99).

Di satu sisi, sulitnya penyelesaian konflik ini secara mendasar disebabkan tidak terdapatnya titik temu dalam sikap masing-masing pihak yang bertikai, yaitu Arab dan zionis Israel. Arab kukuh tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai Israel, dan Israel bersikeras untuk sementara tidak akan mengubah batas wilayahnya seperti saat ditinggalkan Inggris pada tahun 1948 ataupun menyerahkan wilayah pendudukan tanpa sesuatu imbalan. Jimmy Carter pernah menyatakan bahwa Israel mengklaim tanah Palestina yang ditinggalkan Inggris kepadanya pada tahun 1948, sebagai hak sahnya dan menolak pengakuan negara Palestina di atas tanah yang sama. Namun bangsa Arab tidak

bisa menerima klaim Israel atas tanah itu yang diserobot Israel dengan jalan perampasan dan tanpa persetujuan Arab.

Pada intinya masalah Palestina adalah sengketa atas tanah Palestina antara penduduk Arab dan kaum Yahudi, yang telah merampas tanah Palestina dan mendirikan negara Israel bagi bangsa Yahudi. Sehubungan dengan ini maka peneliti mencoba mengangkat kembali peristiwa masa lampau untuk diteliti dan kemudian diangkat menjadi sebuah skripsi yang berjudul “PERANAN HAMAS DALAM KONFLIK PALESTINA – ISRAEL TAHUN 1967-1972”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi negara Palestina menjelang tahun 1967?
2. Apakah yang melatar belakangi lahirnya Hamas serta tujuannya?
3. Bagaimana gerak dan langkah perjuangan Hamas melawan Israel?
4. Apa sajakah hambatan yang dihadapi Hamas melawan Israel?
5. Apakah solusi pemecahan dari konflik Israel – Palestina ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi tanah Palestina menjelang tahun 1967.
2. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Hamas serta tujuannya.
3. Untuk mengetahui gerak dan langkah perjuangan Hamas melawan Israel.
4. Untuk mengetahui hambatan yang akan dihadapi Hamas melawan Israel.
5. Untuk mengetahui solusi pemecahan dari konflik Israel – Palestina.

D. Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah di dalamnya akan selalu didapatkan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam rangka pengembangan ilmu sejarah yang berkaitan dengan Timur Tengah.
- b. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan yang digunakan dalam rangka pengembangan ilmu sejarah yang berkaitan dengan tema yang telah penulis kemukakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- b. Dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan khususnya mengenai peranan Hamas dalam konflik Israel-Palestina.



